PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK,TRANSPARANSI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERAT PADA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

STIE Widya Wiwaha
Jangan plagiat

DISUSUN OLEH :

NAMA	:	SEPTI MAYASARI
NIM	:	131214169
JURUSAN	:	AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2017

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK,TRANSPARANSI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERAT PADA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DISUSUN OLEH :

NAMA	**:**	**SEPTI MAYASARI**
NIM	**:**	**131214169**
JURUSAN	**:**	**AKUNTANSI**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan pertolongan-Nya, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Karunia dan rizki sehingga penulis beri kesempatan melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan serta diberi kelancaran dalam menempuh pendidikan. Semoga penulis selalu dalam lindungan dan Ridho-Mu. Amin.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Bapak Zulkifli, SE, MM selaku Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses perkuliahan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Bapak Muhammad Robby Wahyudi, SE, MM selaku kepala program studi Akuntansi dan Staf pengajar STIE Widya Wiwaha yang telah meluangkan waktu serta penuh dedikasi telah memberikan ilmunya.
5. Bapak Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak selaku dosen pembimbing skripsi atas segala petunjuk dan arahan serta bimbingannya dalam penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dinas-Dinas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan bantuan dalam melakukan penelitian penyebaran kuesioner sehingga penulis dapat mengumpulkan data-data untuk penulisan skripsi.
7. Kedua orang tuaku Bapak Subari dan Ibu Supartinah tercinta yang senantiasa mengiringi doa dan harapan dengan nasehat, dukungan dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menempuh studi dengan lancar.
8. Kakakku Febri Ristiana yang selalu memberi dukungan, bantuan dan kasih sayangnya.
9. My wew yang senantiasa memberi dukungan, bantuan dan motivasinya.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2013, terima kasih atas kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga silaturahminya akan selalu terjalin sampai kapanpun.
11. Teman-teman satu bimbingan skripsi, terima kasih kalian selalu berbagi informasi dan saling membantu.
12. Teman-teman cewek kelas akuntansi yang gokil dan saling membantu satu sama lain.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam bentuk apapun itu, yang selalu penulis repotkan dan mintai bantuan. Terima kasih telah saling medoakan, menyemangati, dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih semoga Allah SWT yang membalas kebaikan hati kalian semua. Amin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum.wr.wb

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Septi Mayasari

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. RUMUSAN MASALAH 6
1.3. TUJUAN PENELITIAN 6
1.4. MANFAAT PENELITIAN 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI 9
2.2. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 10
2.3. FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 11
2.4. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN APBD 12
2.5. SIKLUS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 13
2.6. GOOD GOVERNANCE 14

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.7. PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD 21

2.8. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 22

2.9. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 24

2.10. REVIEW PENELITIAN TERDAHULU 25

2.11. KERANGKA KONSEPTUAL 27

2.12. HIPOTESIS..... 28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. POPULASI SAMPEL..... 29

3.2. JENIS PENELITIAN 31

3.3. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL 31

3.4. ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN..... 35

3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 35

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 36

BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN 41

4.1.1. KARAKTERISTIK RESPONDEN 41

4.1.2. ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN 45

4.2. UJI KUALITAS DATA 46

4.2.1. UJI VALIDITAS 46

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2.1.1. UJI VALIDITAS VARIABEL AKUNTABILITAS ... 46

4.2.1.2. UJI VALIDITAS VARIABEL TRANSPARANSI 49

4.2.1.3. UJI VALIDITAS VARIABEL PENGAWASAN 52

4.2.1.4. UJI VALIDITAS VARIABEL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 54

4.2.1.5. UJI VALIDITAS VARIABEL (Y) PENGELOLAAN APBD 57

4.2.2. UJI RELIABILITAS 60

4.3. UJI ASUMSI KLASIK 62

4.3.1. UJI MULTIKOLINEARITAS 62

4.3.2. UJI HETEROSKEDASTISITAS 64

4.3.3. UJI NORMALITAS 66

4.4. PENGUJIAN HIPOTESIS 70

4.4.1. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 62

4.4.2. UJI HIPOTESIS PERTAMA 63

4.4.3. UJI HIPOTESIS KEDUA .....,..... 65

4.4.4. UJI HIPOTESIS KETIGA .....,..... 66

4.4.5. UJI HIPOTESIS KEEMPAT 68

4.5. PEMBAHASAN 75

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN 78

5.2. SARAN 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1	Karakterisik Data	43
Tabel 4.2	Karakteristik Responden	44
Tabel 4.3	Deskriptif Statistik	46
Tabel 4.4	Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik	49
Tabel 4.5	Uji Validitas Variabel Transparansi Publik	50
Tabel 4.6	Uji Validitas Variabel Pengawasan	50
Tabel 4.7	Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	51
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Pengelolaan APBD (Y)	52
Tabel 4.9	Output SPSS Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.10	Uji Reliabilitas Variabel	54
Tabel 4.11	Output SPSS Uji Multikoleniaritas	55
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikoleniaritas	56
Tabel 4.13	Output SPSS Uji Park	59
Tabel 4.14	Output SPSS Statistik Normalitas	62
Tabel 4.15	Hasil Analisis Koefisien Determinasi	63
Tabel 4.16	Hasil Uji signifikansi F Akuntabilitas Publik	65
Tabel 4.17	Hasil Uji signifikansi Parsial T	65
Tabel 4.18	Hasil Uji signifikansi F Transparansi Publik	66

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.19	Hasil Uji signifikansi Parsial T	67
Tabel 4.20	Hasil Uji signifikansi F Pengawasan	68
Tabel 4.21	Hasil Uji signifikansi Parsial T	68
Tabel 4.22	Hasil Analisis Koefisien Determinasi	70
Tabel 4.23	Hasil Uji signifikansi F	71
Tabel 4.24	Hasil Uji signifikansi Parsial T	72

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	NAMA GAMBAR	HALAMAN
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1	Grafik Scatterplot	58
Gambar 4.2	Output SPSS Histogram Normalitas	61
Gambar 4.3	Output SPSS Grafik Plot Normalitas	61

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR SKPD PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2. KUESIONER PENELITIAN
3. HASIL PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN
4. REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
5. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik saat ini mengalami perkembangan sangat pesat dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah. Akan tetapi terdapat tuntutan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Organisasi sektor publik sendiri saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang ditimbulkannya. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.

Akuntansi sektor publik sendiri memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada kekuasaan publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, tetapi juga komplektifitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut (Mardiasmo, 2002)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi pengendalian manajemen dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2002).

Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan pengelolaan APBD. Tercapainya pengelolaan APBD yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Pengelolaan APBD yang baik merupakan prinsip *Value For Money (VFM)*. Implementasi prinsip *Value For Money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value For Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada lima elemen utama, yaitu:

1) Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah,
2) Efisien : pencapaian output yang maksimum dengan input yang rendah atau sebaliknya,
3) Efektifitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4) *Equity* : keadilan yang mengacu adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan sosial,

5) *Equality* : penggunaan uang publik tidak hanya digunakan pada kelompok tertentu, melainkan dilakukan secara merata. *Value For Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang maksimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan APBD sendiri tidak lepas dari akuntabilitas publik, transparansi publik, serta pertanggung jawaban publik. Wujud akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD dalam pelayanan masyarakat adalah dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan APBD adalah akuntabilitas dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik *(Good Governance)* adalah adanya pengelolaan APBD yang baik *(Good Financial Governance)*.

Tercapainya pengelolaan APBD yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan publik, pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagai pengguna anggaran dan pengawasan secara tidak langsung terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pengawasan APBD diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, equity, dan equality.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan APBD saat ini adalah menguatnya tuntutan masyarakat diera reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan responsif serta berlakunya Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo,2002)

Governmental Accounting Standars Board (GASB, 1999) dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Mardiasmo, 2002).

Fenomena pengelolaan APBD ini terlihat bahwa informasi penyelenggaraan pemerintah terkait dengan pengelolaan APBD secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum didapatkan masyarakat, publik tidak

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Semua badan publik tidak memberikan disposisi secara tertulis soal dokumen soal rencana kerja atau rencana anggaran pada dinas/satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Fenomena sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, standar akuntansi pemerintah, dan pengelolaan APBD adalah : pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan pelaksanaan anggaran publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah), pelaksanaan anggaran yang buruk, pemborosan anggaran atau anggaran yang tidak hemat, kelambatan melaporkan keuangan serta tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul " PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERAT PADA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ".

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu :

1) Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan APBD secara parsial maupun simultan?

2) Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap pengelolaan APBD secara parsial maupun simultan?
3) Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD secara parsial maupun simultan?
4) Apakah standar akuntansi pemerintahan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan APBD ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagaiberikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan APBD.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan APBD.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderat apakah memperkuat/memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini,yaitu :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1. Bagi penulis

Melalui penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu akuntansi sektor publik yang telah diperoleh selama kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha ke dalam lembaga Pemerintah Daerah yang sesungguhnya. Selain itu, untuk mengetahui pencapaian akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan dalam rangka pengelolaan APBD dan hubungannya dengan keberhasilan dinas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Bagi Lembaga Pemerintah

Untuk memberikan masukan yang berarti bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai fungsi budgeting tentang penggunaan anggaran berdasar *value for money*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya pada khususnya dan bidang ilmu akuntansi sektor publik pada umumnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah selalu melekat dan terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena Keuangan Daerah itu sendiri telah ditetapkan dalam APBD. Selain itu APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Beberapa pengertian tentang Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut".
2. Permendagri No.21 tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut".

Keuangan Daerah sendiri dituangkan sepenuhnya dalam APBD yang mana menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perwujudan dari perencanaan maka, dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada pengelolaan APBD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku penyusun/pengguna anggaran APBD untuk pelayanan publik.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Permendagri No.21 tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Mahsun, (2013) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan APBD merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam organisasi sektor publik. Pengelolaan APBD hendaknya harus mencakup 3 aspek penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 3 aspek tersebut adalah : (1) aspek perencanaan, (2) aspek pengendalian, dan (3) aspek akuntabilitas publik. Pengelolaan APBD dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat agar terjamin secara layak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.3. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2013) dan Mardiasmo (2002) fungsi APBD adalah sebagai berikut :

1) Sebagai alat perencanaan, berfungsi sebagai alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2) Sebagai alat pengendalian, berfungsi untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran dalam mengalokasikan dana pada bidang yang bukan prioritasnya.

3) Sebagai alat kebijakan fiskal, berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4) Sebagai alat politik, berfungsi untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, berfungsi untuk mengkoordinasi antar bagian pemerintahan dan komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
6) Sebagai alat penilaian kinerja, berfungsi menilai kinerja eksekutif berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran.
7) Sebagai alat pemotivasi, berfungsi untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8) Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, yaitu masyarakat, LSM, Perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan APBD

Dalam pengelolaan APBD agar strategi yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka pemerintah daerah perlu memegang teguh komitmen pegelolaan APBD dalam rangka mencapai peningkatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002) prinsip-prinsip pengelolaan APBD adalah sebagai berikut :

1) Otorisasi oleh legislatif

2) Komprehensif

3) Keutuhan anggaran

4) Nondiscretionary Approapriation

5) Periodik

6) Akurat

7) Jelas

8) Diketahui Publik

2.5. Siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pengelolaan APBD dalam mengalokasikan dana publik yang masih lemah akan memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efiisien dan efektivitas anggaran. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Dalam bukunya Mahsun (2013) dan Mardiasmo (2002) siklus anggaran mempunyai 4 tahap yang terdiri dari :

1) Tahap Persiapan

   Merupakan tahap dilakukannya taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia.

2) Tahap Ratifikasi

   Merupakan tahap pengesahan anggaran.

3) Tahap Implementasi/Pelaksanaan

   Merupakan tahap sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Merupakan tahap pertanggungjawaban dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.

2.6. Good Governance

Pengertian Good *Governance* diartikan sebagai cara untuk mengelola urusan-urusan publik secara baik. Menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2002) *Good Governance* berarti cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara baik dan benar, sedangkan menurut *United Nation Development Program* (UNDP) *Good Governance* adalah lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Karakteristik pelaksanaan Good Governance menurut UNDP yaitu meliputi :

1) *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2) *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa memandang status.
3) *Transparency*, informasi yang berakaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4) *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5) *Concensus orientation,* berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) *Equity,* setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Efficiency and effectiveness,* pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) *Accountability,*pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) *Strategic vision,*penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari karakteristik UNDP tersebut, terdapat tiga karakteristik yang dapat diadopsi untuk dapat diperankan dalam pengelolaan APBD yaitu transparansi, akuntabilitas dan *value for money* (*efficiency* dan *effectiveness*).

2.6.1. Akuntabilitas

Mardiasmo (2002) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo (2002) dalam bukunya (Ellwood 1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*Accountability for probity and legality*),
2) Akuntabilitas proses *(process accountability*),
3) Akuntabilitas program *(program accountability*),
4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Pemerintah yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka,cepat,tepat kepada masyarakat,
2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional,dan
5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian program dan kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas pengelolaan APBD adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat). Aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah : (1) Legalitas dan penerimaan dan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya (2) Pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip keuangan daerah meliputi : (1) Adanya suatu sistem akuntansi dalam sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-uudangan yang berlaku (2) Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

2.6.2. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Mardiasmo (2002). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi siapapun yang membutuhkan.

Transparansi bermakna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ditaati dalam peraturan perundang-undangan.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan pertanggungjawaban *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga akan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel,dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Mardiasmo (2003) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut ini :

1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
2) Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses,
3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat,
5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

2.6.3. Pengawasan

Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, *equity*, dan *equality*. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan strategi, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Adanya kegagalan organisasi pengelolaan APBD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan/penyimpangan pada salah satu atau beberapa tahap dalam pengawasan. Agar tidak terjadi kelemahan/penyimpangan dalam mencapai tujuan pengelolaan APBD harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang kuat, penguatan tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran antara DPRD sebagai kekuatan penyeimbang antara eksekutif dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang telah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Pengawasan legislatif dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang dan haknya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan atau Panitia Kerja (Panja) agar terhadap jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik mulai proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawas eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.6.4. Value For Money

Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money (VFM)* dalam menjalankan aktivitasnya. Mardiasmo (2002) menyatakan *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen utama yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dan ditambah lagi dua elemen konsep *value for money* yaitu *equity* dan *equality*.

Ekonomi, merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga rendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran teretentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Equity (Keadilan) mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.

Equality, merupakan penggunaan dana publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

2.7. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD

Salah satu bagian dari akuntansi sektor publik adalah bagian yang membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, pengawasan dengan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas, transparansi, pengawasan merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan mutu pengelolaan APBD.

Mardiasmo (2002) menyatakan salah satu ciri akuntabilitas adalah memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mardiasmo (2002) APBD yang transparan adalah adanya keterbukaan secara penuh atas setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan pengawasan APBD diperlukan agar tujuan pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APBD, akan menciptakan pengelolaan APBD yang baik. Pengelolaan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

APBD yang baik adalah (1) penggunaan anggaran yang hemat, (2) sesuai dengan kebutuhan publik, (3) adil dan merata (4) dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.8. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannnya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a) Relevan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, memprediksi masa depan, mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Informasi yang relevan memiliki ciri : (a) memiliki manfaat umpan balik, (b) memiliki manfaat prediktif, (c) tepat waktu, dan (d) lengkap.

b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari penegertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu : (a) penyajian jujur, (b) dapat diverifikasi, dan (c) netralitas.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umunya.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

keuangan pemerintah adalah sebagai berikut : (a) basis akuntansi, (b) prinsip nilai historis, (c) prinsip realisasi, (d) prinsip substansi menggungguli bentuk formal, (e) prinsip periodisitas, (f) prinsip konsistensi, (g) prinsip pengungkapan lengkap, dan (h) prinsip penyajian wajar.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

2.9. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Pengguna anggaran tersebut adalah para pejabat pemegang kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

2.10. Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik,Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sopamah dan Isa Wahyudi (2004)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD)	Pengetahuan Anggaran Akuntabilitas Publik Partisipasi Masyarakat Transparansi Kebijakan Publik	Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD Pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD Pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD
2	Yesi Mutia Basri (2008)	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	Pengetahuan Anggaran Pengawasan Keuangan Daerah Partisipasi Masyarakat Transparansi Kebijakan Publik	Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pengawasan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh pengetahuan Dewan, dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

				keuangan Daerah
3	Liper Siregar (2011)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat	Pengelolaan APBD Akuntabilitas Publik Transparansi Publik Pengawasan Publik Standar Akuntansi Pemerintah	Akuntabilitas Publik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Transparansi Publik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Pengawasan Publik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Standar Akuntansi Pemerintah tidak memoderasi hubungan pengelolaan APBD dengan variabel bebas.
4	Rezky Mulya Anugriani (2014)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Nggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bone	Akuntabilitas Transparansi Pengawasan *Value For Money*	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money* Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money* Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money* Terjadi hubungan yang cukup kuat antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap anggaran berkonsep *Value For Money*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.11. Kerangka Konseptual

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasikan 3 variabel independen (variabel X) yaitu akuntabilitas publik (X1), transparansi publik (X2), pengawasan (X3) dan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderator yang diperkirakan mempengaruhi baik simultan maupun parsial terhadap pengelolaan APBD (variabel Y).

Gambar 2.1

Rerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

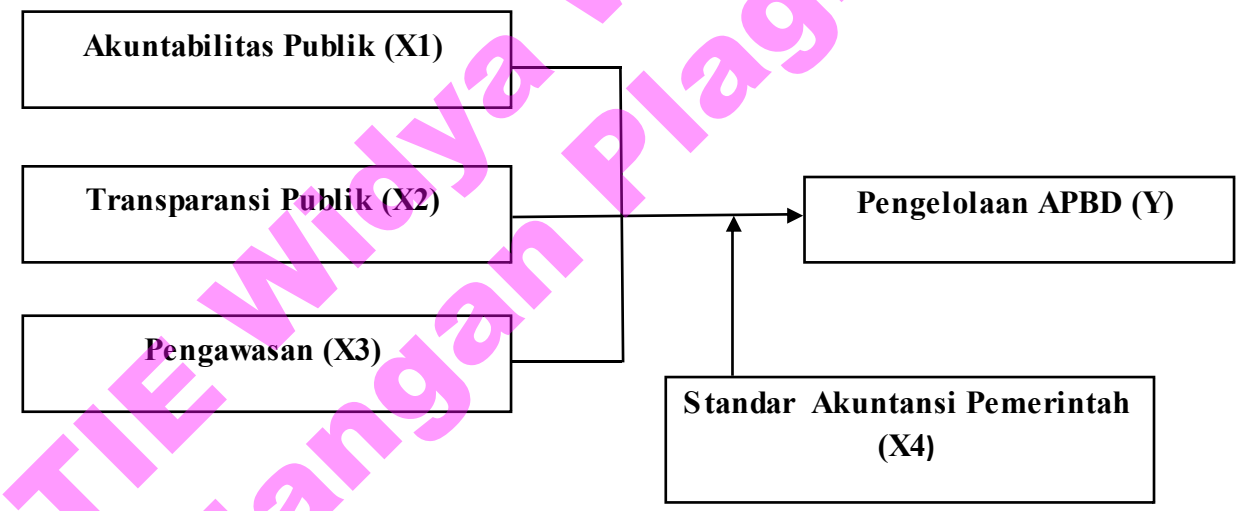

Berdasarkan masalah penelitian maka peneliti mengembangkan kerangka penelitian ini diuji secara simultan dan parsial yaitu Pengelolaan APBD (Y) diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh variabel Independen (X) yaitu Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi Publik (X2), Pengawasan (X3), dan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Variabel Moderator.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami sebagai penggunaan keuangan daerah untuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan untuk dilakukan berdasarkan prinsip *Value For Money* yaitu ekonomi, efisiensi, efektifitas, *equity,* dan *equality.* Agar pengelolaan APBD dapat berjalan berdasarkan 5 konsep *value for money* diperlukan akuntabilitas publik.

2.12. Hipotesis

Menurut Gendro Wiyono (2011), hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih varabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut dperkirakan berdasarkan kerangka konseptual yang dirumuskan untuk penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan diharapkan solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

H1 = Akuntabilitas publik berpengaruh secara simultan maupun pasial terhadap pengelolaan APBD.

H2 = Transparansi publik berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap pengelolaan APBD.

H3 = Pengawasan publik berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap pengelolaan APBD.

H4 = Standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderat apakah akan memperkuat/memperlemah hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. (Gendro Wiyono, 2011:75).

Populasi penelitian ini adalah seluruh Satuan Kepala Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, 4 Kabupaten terdiri dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung kidul, Kabupaten Sleman, dan 1 Kota Yogyakarta.

Gendro Wiyono (2011 : 76) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian populasi yang terwakili dan akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yaang dimiliki oleh populasi yang terwakili. Sampel dipilih dengan menggunakan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

teknik *probability cluster sampling*. *Cluster sampling* merupakan pengambilan sampel dilakukan apabila wilayah tertentu respondennya heterogen, dan tidak dapat dilakukan homogenitas (Gendro Wiyono, 2011 :88).

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan unuk memberikan bukti secara empiris pengaruh akuntabilias publik, transparansi publik, dan pengawasan yang diaktualisasikan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderatnya. Dalam penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan gabungan dari dua metode penelitian yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini metode kualitatif merupakan serangkaian informasi yang masih merupakan keterangan-keterangan, sedangkan metode kuantitatif data statistik berbentuk angka-angka hasil dari pengolahan data kualitatif. Dengan gabungan dari dua metode tersebut sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan terhadap seluruh populasi.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Gendro Wiyono (2011), variabel merupakan apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk obyek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk obyek atau orang yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan), satu variabel dependen (pengelolaan APBD), dan satu variabel moderating (standar akuntansi pemerintah) yang diukur

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dengan menggunakan skala likert. Menurut Gendro Wiyono (2011), Skala Likert merupakan skala yang digunakan peneliti jika ingin mendapatkan data mengenai bobot setiap jawaban yang diberikan kepada responden.

1. Pengelolaan APBD merupakan variabel dependen/variabel terikat (Y), pengelolaan APBD merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan APBD berprinsip *Value For Money* yaitu : (1) Ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, (2) Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (3) Efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, (4) Equity (keadilan) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi, serta (5) Equality (kesetaraan) penggunaan uang publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. Pengukuran variabel pengelolaan APBD menggunakan teknik kuisioner dengan skala 5 point.
2. Variabel independen/variabel bebas dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas publik (X1), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah yang akuntabel mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Pengelolaan APBD yang mengarah kepada akuntabilitas publik yang akan meningkatkan ekonomi, efisien, dan efektifitas. Pengukuran penelitian variabel ini untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan APBD menggunakan teknik kuisioner dengan skala 5 point.

3. Variabel independen/variabel terikat kedua dalam penelitian ini adalah Transparansi publik (X2), Transparansi publik merupakan kondisi dimana adanya keterbukaan secara penuh, prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapainya. Transparansi publik merupakan salah satu prinsip dari *Good Governance*. Pengelolaan APBD dapat dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Terdapat laporan pertanggunngjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, (5) Terdapat sistem

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pemberian informasi kepada publik. Pengelolaan APBD yang mengarah kepada Transparansi publik akan meningkatkan ekonomi, efisien, dan efektifitas. Pengukuran penelitian variabel ini untuk mengukur sejauh mana transparansi publik berpengaruh terhadap pengelolaan APBD menggunakan teknik kuisioner dengan skala 5 point.

4. Variabel independen/variabel terikat ketiga dalam penelitian ini adalah Pengawasan publik (X3), Pengawasan publik merupakan pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Pengelolaan APBD yang mengarah kepada Pengawasan publik akan meningkatkan ekonomi, efisien, dan efektifitas. Pengukuran penelitian variabel ini untuk mengukur sejauh mana pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD menggunakan teknik kuisioner dengan skala 5 point.
5. Standar Akuntansi Pemerintah sebagai variabel moderating dalam penelitian ini. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Karakeristik berikut ini adalah prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yanng dikehendaki yaitu (1) Relevan (2) Andal (3) Dapat dibandingkan (4) Dapat dipahami. Pengukuran penelitian variabel ini menggunakan kuisioner dengan skala 5 point untuk menunjukkan apakah Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah diterapkan dapat memperkuat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

hubungan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah.

Pengkukuran dari masing-masing variabel menggunakan skala *Likert* dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan oleh responden dengan skor 5 point (SS = Sangat Setuju), (S = Setuju), (TT = Tidak Tahu), (TS = Tidak Setuju), (STS = Sangat Tidak Setuju).

3.4. Analisis Data dan Pengujian

Metode analisis data dan pengujian dalam penelitian ini adalah (1) Analisis deskriptif untuk mendiskripsikan data sampel dan gambaran dari masing-masing variabel, (2) Analisis statistik inferensial digunakan alat analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Menurut Gendro Wiyono (2011), data kuantitatif merupakan serangkaian informasi yang masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja.

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya yang berupa data kualitatif. Data primer sering disebut sebagai data mentah (*raw data*). Para peneliti hanya dapat menggali dan memperoleh jenis data ini dari sumber pertama, apakah responden masyarakat biasa, perusahaan-perusahaan, karyawan, dan lain-lain.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

(Gendro Wiyono, 2011:133). Dengan demikian data primer merupakan data murni yang diperoleh dari pengumplan data secara langsung yang masih perlu pengolahan lebih lanjut agar dapat memiliki arti.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survey. Teknik survey merupakan teknik pengumpulan data dimana elemen yang diteliti hanya sebagian dari populasi (sampel).

Instrumen penelitian dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden (Gendro Wiyono, 2011).

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Uji Kualitas Data

3.6.1.1. Uji Validitas

Validitas adalah pengukuran konsep dengan mengukur kenyataannya terhadap konsep yang diukur. Validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi dalam instrumen yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang valid. Instrumen yang bisa dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Gendro Wiyono, 2011). Uji Validitas dalam penelitian ini menggunakan *Bivariate Correlation Pearson.*

Rumus uji validitas adalah sebagai berikut :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

$$Rix = \frac{n \sum ix - (\sum [i])(\sum [x])}{\sqrt{[n\sum i^2 - (\sum i)^2][n\sum x^2 (\sum x)^2]}}$$

Keterangan :

Rix = koefisien korelasi X dan Y

I = skor item

X = skor total

n = banyaknya subyek

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

1) Jika signifikan dari r hitung ≥ r tabel, maka dinyatakan valid
2) Jika signifikan dari r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid.

3.6.1.2. Uji Reliabilias

Uji Reliabilias digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan terbebas dari kesalahan dan dijamin keakuratannya. Untuk menguji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Metode ini banyak digunakan karena rumus tidak berpengaruh jika varian dan kovarian dari komponen-komponennya tidak sama. Rumus uji Reliabilitas adalah sebagai berikut :

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left[1 - \frac{\sum \sigma^2 XL}{\sigma^2 X}\right]$$

Keterangan :

σ = Cronbach's Coefficient Alpha atau reliabilitas instrumen

K = jumlah butir pertanyaan

$\sum \sigma^2 XL$ = total varian masing-masing

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

$\sigma^2 X$ = varian dari total skor

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian asumsi klasik yang secara statistik adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS) dalam penelitian. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi : pengujian normalitas, pengujian linearitas, pengujian multikolinearitas, pengujian heterokedastisitas, dan pengujian autokorelasi. Akan tetapi dalam pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini tidak menggunakan pengujian autokorelasi karena data dalam penelitian ini adalah data *cross section* bukan data *time series*. Dalam penelitian ini pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi : pengujian multikolinearitas, pegujian heterokedastisitas, dan pengujian normalitas.

3.6.3.1. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2006), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (VIF = 1/*Tolerance*). Nilai umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10.

3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual untuk pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedatisitas karena menghimpun data yang mewakili berbagau ukuran kecil, sedang, dan besar (Ghozali, 2006). Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu :

1. Melihat Grafik *Scatterplots* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Untuk melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
    a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatasdan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji statistik yang disebut uji park. Uji park yaitu meregresikan nilai residual (Lnei^2) dengan masing-masing variabel independen. Kriteria pengujian sebagai berikut :

H_0 = tidak ada gejala heterokedastisitas

H_a = ada gejala heterokdastisitas

Hal ini berarti :

H_0 = diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, yang berarti tidak terdapat heterokedastisitas

H_0 = ditolak jika – t hitung > t tabel atau – t hitung < -t tabel, yang berarti terdapat heterokedastisitas.

3.6.3.3. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi ynag baik adalah yang memiliki nilai residual yng terdistribusi secara normal (ghozali, 2006). Ada dua metode untuk uji normaitas, yaitu :

1. Metode Analisis Grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

grafik *Normal P-Plot of regression standardized residual*, sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Metode analisis Statistik non-parametrik dengan uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov* (K-S). Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

   H0 = Data residual berdistribusi normal.

   HA = Data residual berdistribusi tidak normal.

3.6.2. Uji Hipotesis

3.6.2.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda didasari pada hubungan fungsional maupun hubungan kausal dari dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi ganda dilakukan bila jumlah variabel independennya terdapat minimal 2 (dua). Persamaan dituliskan sebagai berikut,

Persamaan Regresi tiga prediktor : $Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3$

Bentuk hipotesis Regresi Ganda

$H_0 = \beta\ 1 = \beta 2 = \beta 3 = \cdots = \beta k = 0$

$H_1 = \beta\ 1 \neq \beta 2 \neq \beta 3 \neq \cdots \neq \beta k \neq 0$

Kriteria pengujian

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima, H_0 ditolak

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.6.2.2. Uji *Moderate Regression Analysis* (MRA)

Pengujian hipotesis moderasi dalam penelitian ini menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Dengan cara mentransformasikan seluruh variabel ke dalam bentuk Ln atau Log10 dengan meregresikan nilai residualnya.

Model pengujian ini membutuhkan dua tahap persamaan sebagai berikut

I. $Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3 + \beta 4\ X4 + \beta 5\ MRA\ (X1.X4) + \beta 6\ MRA\ (X2.X4) + \beta 7\ MRA\ (X3.X4) + e$

II. $Ln_Y = \alpha + \beta 1\ Ln_X1 + \beta 2\ Ln_X2 + \beta 3\ Ln_X3 + \beta 4\ Ln_{X4} + \beta 5\ Ln\ MRA\ (X1.X4) + \beta 6\ Ln\ MRA\ (X2.X4) + \beta 7 Ln\ MRA\ (X3.X4) + e$

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 75 responden yang terkait dengan pengelolaan APBD pada masing-masing Dinas di Kabupaten yang berlokasi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 79 eksemplar sesuai dengan perijinan di masing-masing Kabupaten yang terkait dengan pengelolaan APBD. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 79 eksemplar dapat terkumpul kembali sebanyak 75 eksemplar sehingga dapat dipergunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Karakteristik Data

No	Kuesioner yang Disebar	Kuesioner yang Kembali
1	79	75
Tingkat pengembalian = (75/79 x 100 % = 94,93 %		

Sumber : Data *Primer*, diolah 2017

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Jumlah sampel		Frekuensi	Persentase
		75	100 %
Jenis kelamin	Pria	23	30,7 %
	Wanita	52	69,3 %
Usia	21-30 tahun	3	4,0 %
	30-40 tahun	17	22,7 %
	40-50 tahun	43	57,3 %
	>50 tahun	12	16,0 %
Pendidikan Terakhir	SMA	3	4,0 %
	DIPLOMA	5	4,7 %
	S1	39	52,0 %
	S2	28	37,3 %

Sumber : Data *Primer*, diolah 2017

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang demografi sampel responden penelitian yang terdiri dari : (1) jenis kelamin, (2) umur, (3) tingkat pendidikan.

Pada demografi responden jenis kelamin menunjukkan bahwa pejabat yang terkait dengan pengelolaan APBD paling banyak adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 orang (69,3%) dan berjenis kelamin pria sebanyak 23 orang (30,7%).

Pada demografi responden umur menunjukkan bahwa pejabat yang terkait dengan pengelolaan APBD dari data umur pejabat pada Dinas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dikelompokkan kedalam 4 kelompok yaitu pejabat pengelola APBD paling banyak adalah berumur 41-50 tahun sebanyak 43 orang (57,3 %), yang berumur 31-40 tahun sebanyak 17 orang (22,7%), yang berumur 50 tahun keatas sebanyak 12 orang (16%), dan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 3 orang (4%).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pada demografi responden tingkat pendidkan menunjukkan bahwa pejabat yang terkait dengan pengelolaan APBD yang memiliki tingkat pendidikan paling banyak adalah Strata Satu sebanyak 39 orang (52%), Pascasarjana sebanyak 28 orang (37,3%), Diploma sebanyak 5 orang (6,7%), dan paling sedikit SMA sebanyak 3 orang (4%).

4.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan APBD selaku pengguna anggaran daerah, pada Dinas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyebar kuesioner kepada 75 responden secara langsung. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah pejabat SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi peneliti menggunakan sampel dalam penelitian ini terbatas pada pejabat Dinas-Dinas dalam SKPD saja, tidak menyeluruh pada perangkat SKPD. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 75 pejabat SKPD. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh deskripsi hasil kuesioner oleh Dinas atau SKPD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan pada tabel 4.3.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.3
Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKUNTABILITAS (X1)	75	30.00	49.00	41.9200	3.34809
TRANSPARANSI (X2)	75	28.00	45.00	35.3067	2.80431
PENGAWASAN (X3)	75	35.00	50.00	40.3333	2.82524
STANDAR AKT. PEM (X4)	75	26.00	50.00	41.6533	4.10502
PENGELOLAAN APBD (Y)	75	33.00	55.00	46.0400	4.15718
TOTAL	75	175.00	236.00	2.0525E2	12.24534
Valid N (listwise)	75				

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dari 75 sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, variabel pengelolaan APBD yang merupakan variabel dependen (Y) mempunya inilai rata-rata 46,04% yang berarti bahwa pengelolaan APBD oleh pejabat yang terkait pada Dinas di dalam SKPD pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 11 pertanyaan pada kuesioner mengenai variabel Y menghasilkan angka 4 mendekati angka 5, berarti rata-rata responden terhadap pengelolaan APBD adalah kategori sangat setuju.

Variabel Akuntabilitas Publik merupakan variabel independen (X_1) mempunyai nilai rata-rata 41,92% berarti bahwa akuntabilitas publik oleh pejabat yang terkait pada Dinas di dalam SKPD padaPemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 11 pertanyaan pada kuesioner mengenai variabel (X_1) menghasilkan angka 4, berarti rata-rata responden terhadap akuntabilitas public adalah kategori setuju.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Variabel Transparansi Publik merupakan variable independen (X_2) mempunyai nilai rata-rata 35,30% berarti bahwa transparansi public oleh pejabat yang terkait pada Dinas di dalam SKPD pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 10 pertanyaan pada kuesioner mengenai variabel (X_2) menghasilkan angka 3, berarti rata-rata responden terhadap transparansi publik adalah kategori tidak tahu.

Variabel Pengawasan merupakan variabel independen (X_3) mempunyai nilai rata-rata 40,33% berarti bahwa pengawasan oleh pejabat yang terkait pada Dinas di dalam SKPD pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 11 pertanyaan pada kuesioner mengenai variabel (X_3) menghasilkan angka 4, berarti rata-rata responden terhadap pengawasan adalah kategori setuju.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan variable moderat (X_4) mempunyai nilai rata-rata 41,65% berarti bahwa standar akuntansi pemerintah oleh pejabat yang terkait pada Dinas di dalam SKPD pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 11 pertanyaan pada kuesioner mengenai variabel (X_4) menghasilkan angka 4, berarti rata-rata responden terhadap standar akuntansi pemerintah adalah kategori setuju.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2. Uji Kualitas Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer, maka sebelum dilakukan pengujian data deskripsi maupun pengujian asumsi perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

4.2.1. Uji Validitas Data

4.2.1.1. Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik

Ghozali (2006) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkpakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi *Bivariate Pearson*, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total.

Pengujian validitas variabel akuntabilitas menggunakan uji dua sisi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2 , dengan taraf signifikansi (α) 0,05 (taraf kepercayaan 95%). Kriteria pegujiannya jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan nilai positif maka pertanyaan dinyatakan valid. Jumlah data (n) = 75. Rumus mencari r_{tabel} adalah df = n - 2 (n = 73) sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar = 0,227. Setelah dilakukan pengujian validitas data pada variabel akuntabilitas , item pertanyaan X_5 dan X_9 dinyatakan tidak valid sehingga harus dibuang. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 Berikut.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.4

Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik

Pertanyaan	r hitung	r table	Validitas
Ak 1	0,417	0,227	Valid
Ak 2	0,611	0,227	Valid
Ak 3	0,586	0,227	Valid
Ak 4	0,375	0,227	Valid

Ak 5	0,082	0,227	Tidak valid
Ak 6	0,714	0,227	Valid
Ak 7	0,607	0,227	Valid
Ak 8	0,404	0,227	Valid
Ak 9	0,201	0,227	Tidak valid
Ak 10	0,594	0,227	Valid
Ak 11	0,489	0,227	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2017

4.2.1.2. Uji Validitas Variabel Transparansi Publik

Pengujian validitas variabel transparansi menggunakan uji dua sisi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2 , dengan taraf signifikansi (α) 0,05 (taraf kepercayaan 95%). Kriteria pegujiannya jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan nilai positif maka pertanyaan dinyatakan valid. Jumlah data (n) = 75. Rumus mencari r_{tabel} adalah df = n - 2 (n = 73) sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar = 0,227. Setelah dilakukan pengujian validitas data pada variabel transparansi, item pertanyaan Tr_4 dan Tr_5 dinyatakan tidak valid sehingga harus dibuang. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.5 Berikut.

Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel Transparansi Publik

Pertanyaan	r hitung	r table	Validitas
Tr1	0,421	0,227	Valid
Tr2	0,445	0,227	Valid
Tr3	0,575	0,227	Valid
Tr4	0,105	0,227	Tidakvalid
Tr5	0,222	0,227	Tidak valid
Tr6	0,401	0,227	Valid
Tr7	0,523	0,227	Valid
Tr8	0,358	0,227	Valid

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tr9	0,651	0,227	Valid
Tr10	0,699	0,227	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2017

4.2.1.3. Uji Validitas Variabel Pengawasan

Pengujian validitas variabel pengawasan menggunakan uji dua sisi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2 , dengan taraf signifikansi (α) 0,05 (taraf kepercayaan 95%). Kriteria pegujiannya jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan nilai positif maka pertanyaan dinyatakan valid. Jumlah data (n) = 75. Rumus mencari r_{tabel} adalah df = n - 2 (n = 73) sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar = 0,227. Setelah dilakukan pengujian validitas data pada variabel pengawasan, item pertanyaan Pw_2 dan Pw_{10} dinyatakan tidak valid sehingga harus dibuang. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.6 Berikut.

Tabel 4.6
Uji Validitas Variabel Pengawasan

Pertanyaan	r hitung	r table	Validitas
Pw 1	0,349	0,227	Valid
Pw 2	0,060	0,227	Tidakvalid
Pw 3	0,639	0,227	Valid
Pw 4	0,550	0,227	Valid
Pw 5	0,472	0,227	Valid
Pw 6	0,500	0,227	Valid
Pw 7	0,421	0,227	Valid
Pw 8	0,420	0,227	Valid
Pw 9	0,492	0,227	Valid
Pw 10	0,174	0,227	Tidakvalid
Pw 11	0,476	0,227	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2017

4.2.1.4. Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pengujian validitas variabel standar akuntansi pemerintah menggunakan uji dua sisi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dengan taraf signifikansi (α) 0,05 (taraf kepercayaan 95%). Kriteria pegujiannya jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan nilai positif maka pertanyaan dinyatakan valid. Jumlah data (n) = 75. Rumus mencari r_{tabel} adalah df = n - 2 (n = 73) sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar = 0,227. Setelah dilakukan pengujian validitas data pada variabel standar akuntansi pemerintah, semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7

Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

Pertanyaan	r hitung	r table	Validitas
SAP 1	0,640	0,227	Valid
SAP 2	0,728	0,227	Valid
SAP3	0,797	0,227	Valid
SAP 4	0,751	0,227	Valid
SAP 5	0,607	0,227	Valid
SAP 6	0,794	0,227	Valid
SAP 7	0,533	0,227	Valid
SAP 8	0,788	0,227	Valid
SAP 9	0,804	0,227	Valid
SAP 10	0,639	0,227	Valid

Sumber : Data Primer, diolah 2017

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2.1.5. Uji Validitas Variabel Pengelolaan APBD (Y)

Pengujian validitas variabel pengelolaan APBD menggunakan uji dua sisi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dengan taraf signifikansi (α) 0,05 (taraf kepercayaan 95%). Kriteria pegujiannya jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan nilai positif maka pertanyaan dinyatakan valid. Jumlah data (n) = 75. Rumus mencari r_{tabel} adalah df = n - 2 (n =

73) sehingga diperoleh r $_{tabel}$ sebesar = 0,227. Setelah dilakukan pengujian validitas data pada variabel Pengelolaan APBD, semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.8 Berikut.

Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel Pengelolaan APBD (Y)

Pertanyaan	r hitung	r table	Validitas
P. APBD 1	0,599	0,227	Valid
P. APBD 2	0,771	0,227	Valid
P. APBD 3	0,584	0,227	Valid
P. APBD 4	0,672	0,227	Valid
P. APBD 5	0,798	0,227	Valid
P. APBD 6	0,593	0,227	Valid
P. APBD 7	0,650	0,227	Valid
P. APBD 8	0,701	0,227	Valid
P. APBD 9	0,720	0,227	Valid
P. APBD 10	0,816	0,227	Valid
P. APBD 11	0,738	0,227	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel data validitas keseluruhan menunjukkan bahwa item pertanyaan variabel penelitian mempunyai nilai korelasi $R_{hitung} > R_{tabel}$ yaitu = 0,227 kecuali untuk pertanyaan variabel akuntabilitas X_5, X_9, variabel transparansi X_4, X_5, dan variabel pengawasan X_2, X_{10}. Item pertanyaan variabel-variabel peneitian yang valid dapat digunakan pada analisis selanjutnya, sementara item pertanyaan variabel-variabel yang tidak valid harus dibuang atau tidak digunakan lagi dalam analisis selanjutnya.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dikatakan reliabel atau handal dengan jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2005) dalam

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

bukunya (Nunnally,1960), suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel diteliti lebih besar dari 0,60. Hal ini menujukkan bahwa instrumen tersebut adalah reliabel. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.9

Tabel 4.9
Output SPSS Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.740	.739	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AKUNTABILITAS (X1)	163.3333	116.874	.302	.122	.763
TRANSPARANSI (X2)	169.9467	113.619	.476	.234	.708
PENGAWASAN (X3)	164.9200	111.885	.503	.268	.699
STANDAR AKT. PEM (X4)	163.6000	84.541	.643	.479	.634
PENGELOLAAN APBD (Y)	159.2133	84.116	.637	.503	.637

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Alpha Croncbach's	Batas Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas (X_1)	0,763	0,60	Reliabel
Transparansi (X_2)	0,708	0,60	Reliabel
Pengawasan (X_3)	0,699	0,60	Reliabel

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

SAP (X_4)	0,634	0,60	Reliabel
Pengelolaan APBD (Y)	0,637	0,60	Reliabel

Sumber : Data *Primer*, diolah 2017

4.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik ini terdiri dari pengujian multikolinearitas, pengujian heteroskedastisitas, dan pengujian normalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section*. Oleh karena itu pengujian auto korelasi tidak diperlukan.

4.3.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (VIF = 1/*Tolerance*). Nilai umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $\leq 0{,}10$ dan nilai VIF ≥ 10.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.11
Output SPSS Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.221	6.483		.805	.423		
AKUNTABILITAS (X1)	-.047	.112	-.038	-.421	.675	.880	1.136
TRANSPARANSI (X2)	.240	.140	.162	1.715	.091	.799	1.252
PENGAWASAN (X3)	.308	.140	.209	2.199	.031	.782	1.279
STANDAR AKT. PEM (X4	.526	.100	.519	5.247	.000	.726	1.378

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN APBD (Y)

Hasil uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *Tolerance* ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Dari hasil olah data penelitian disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas karena tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hal ini ditunjukkan pada gambar 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics		
Variabel	**Tolerance**	**VIF**
Akuntabilitas	0,880	1,136
Transparansi	0,799	1,252
Pengawasan	0,782	1,279
Standar Akuntansi Pemerintah	0,726	1,378

Sumber : Data *Primer*, diolah 2017

4.3.2. Uji Heterokedastisitas

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedatisitas karena menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar (Ghozali, 2006). Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan uji grafik *scatterplot* dan uji statistik uji park.

4.3.2.1. Uji Grafik *Scatterplot*

Melihat Grafik *Scatterplots* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Untuk melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah resisual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Dasar pengambilan keputusan adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti pada gambar 4.1.

Gambar 4.1
Output SPSS Grafik Scatterplot

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

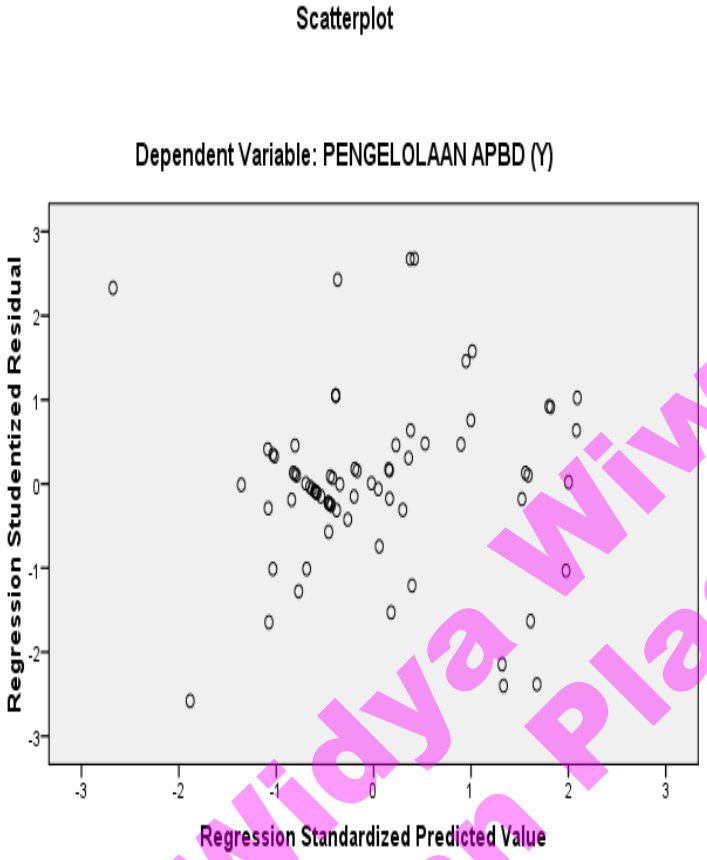

4.3.2.2. Uji Statistik

Uji Statistik yang dilakukan adalah Uji Park. Uji park yaitu meregresikan nilai residual ($Lnei^2$) dengan masing-masing variabel independen. Koefisien beta secara signifikan mempengaruhi variabel independen. Hasil tampilan output spss memberikan koefisien bahwa variabel independen tidak ada yang signifikan, maka disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini konsisten dengan hasil uji *Scatterplot*. Seperti pada tampilan gambar 4.18 output spss dibawah ini dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

H_0 = diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, yang berarti tidak terdapat heterokedastisitas

H_0 = ditolak jika – t hitung > t tabel atau – t hitung < -t tabel, yang berarti terdapat heterokedastisitas.

Tabel 4.13
Output SPSS Uji Park

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	5.221	6.483		.805	.423
AKUNTABILITAS (X1)	-.047	.112	-.038	-.421	.675
TRANSPARANSI (X2)	.240	.140	.162	1.715	.091
PENGAWASAN (X3)	.308	.140	.209	2.199	.031
STANDAR AKT. PEM (X4)	.526	.100	.519	5.247	.000

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN APBD (Y)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.3.3. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi ynag baik adalah yang memiliki nilai residual yng terdistribusi secara normal (ghozali, 2006). Seperti pada Gambar 4.2 pada gambar histogram memberikan pola distribusi normal tidak menceng ke kiri atau ke kanan.

Ada dua metode untuk uji normaitas, yaitu :

1. Metode Analisis Grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-Plot of regression standardized residual*, sebagai dasar

pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2
Output SPSS Histogram Normalitas

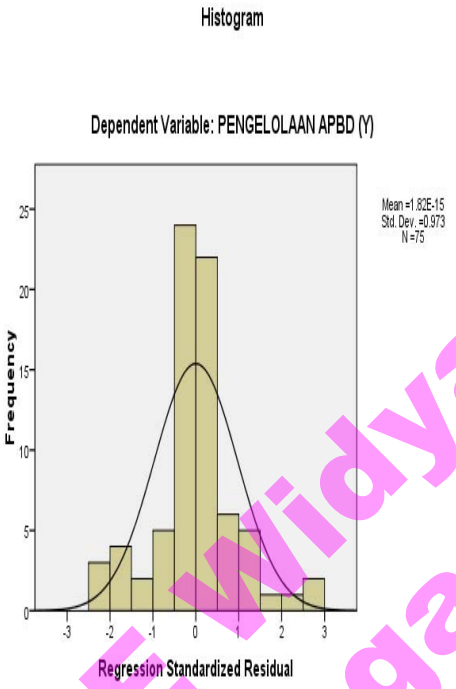

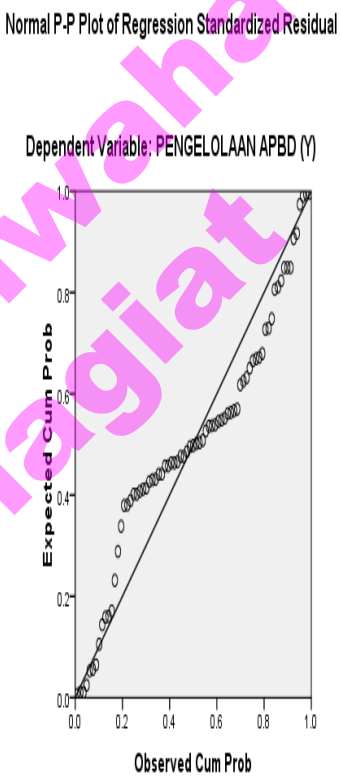

Gambar 4.3
Output SPSS Grafik Plot Normalitas

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berdasarkan grafik plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram pola distribusi data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Metode analisis Statistik non-parametrik dengan uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov* (K-S). Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Pada tabel 4.13 menunjukkan nilai signifikansi (*Asymp. Sig 2-tailed*) sebesar 0,19. Karena signifikansi lebih dari 0,05 (0,19 > 0,05) berarti nilai residual tersebut telah normal.

Tabel 4.13
Output SPSS Statistik Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			75
Normal Parameters[a]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.93037028
Most Extreme Differences	Absolute		.176
	Positive		.122
	Negative		-.176
Kolmogorov-Smirnov Z			1.528
Asymp. Sig. (2-tailed)			.019
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.013[c]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.010
		Upper Bound	.016

a. Test distribution is Normal.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji akuntabilitas publik berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan APBD, transparansi publik berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan APBD, dan pengawasan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan APBD. Pengujian dari hipotesis tersebut di uji dengan persamaan :

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3 + e$$

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel independen (X_1, X_2, dan X_3) terhadap variabel dependen (Y). Niali koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai ***R square*** dan ***Adjusted R- Square.*** *R square* digunakan pada 1 variabel bebas, sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan pada variabel bebas lebih dari satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen terbatas, sedangkan nilai R^2 sama dengan 1 berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen adalah sempurna.

Tabel 4.15
Hasil Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary				
Model	**R**	***R square***	***Adjusted R-Square***	***Std. Error of The Estimate***
1	0,555	0,308	0,278	3,53128

Hasil analisis model summary besarnya *adjusted R square* adalah 0,278 atau 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen (akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan) terhadap variabel dependen (pengelolaan APBD) sebesar 2,78% dengan rincian (100% - 2,78% = 97,22%) sedangkan sisanya 97,22%

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.4.2. Uji Hipotesis Akuntabilitas Publik Berpengaruh Secara Simultan Maupun Parsial Terhadap Pengelolaan APBD

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik Secara Simultan Maupun Parsial Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD. Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji signifikansi F dari tabel 4.16 di dapatkan nilai F hitung sebesar 10.519 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan APBD dengan kata lain akuntabilitas publik secara keseluruhan (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

Tabel 4.16
Hasil Uji Signifikansi F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	393.512	3	131.171	10.519	.000[a]
	Residual	885.368	71	12.470		
	Total	1278.880	74			

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Dari hasil uji signifikansi T pada tabel 4.17 menunjukkan nilai t hitung untuk variabel akuntabilitas publik adalah sebesar 0,128 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung < t tabel (0,128 < 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,898 lebih besar dari

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,898 > 0,05), maka hipotesis pertama ditolak, artinya akuntabilitas publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Tabel 4.17
Hasil Uji Signifikansi Parsial T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.880	7.590		.906	.368
AKUNTABILITAS (X1)	.017	.130	.013	.128	.898
TRANSPARANSI (X2)	.434	.158	.293	2.748	.008
PENGAWASAN (X3)	.574	.153	.390	3.743	.000

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.4.3. Uji Hipotesis Transparansi Publik Secara Simultan Maupun Parsial Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Transparansi Publik Secara Simultan Maupun Parsial Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD. Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji signifikansi F dari tabel 4.18 di dapatkan nilai F hitung sebesar 10.519 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan APBD dengan kata lain transparansi publik secara keseluruhan (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

Tabel 4.18
Hasil Uji Signifikansi F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	393.512	3	131.171	10.519	.000[a]
	Residual	885.368	71	12.470		
	Total	1278.880	74			

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Dari hasil uji signifikansi T pada tabel 4.22 menunjukkan nilai t hitung untuk variabel transparansi publik adalah sebesar 2,748 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung > t tabel (2,748 > 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,008 lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,008 > 0,05), maka hipotesis kedua ditolak, artinya transparansi publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Tabel 4.19
Hasil Uji Signifikansi Parsial T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.880	7.590		.906	.368
AKUNTABILITAS (X1)	.017	.130	.013	.128	.898
TRANSPARANSI (X2)	.434	.158	.293	2.748	.008
PENGAWASAN (X3)	.574	.153	.390	3.743	.000

4.4.4. Uji Hipotesis Pengawasan Secara Simultan Maupun Parsial Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Pengawasan Secara Simultan Maupun Parsial Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD. Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Hasil uji signifikansi F dari tabel 4.20 di dapatkan nilai F hitung sebesar 10.519 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan APBD dengan kata lain pengawasan secara keseluruhan (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

Tabel 4.20
Hasil Uji Signifikansi F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	393.512	3	131.171	10.519	.000[a]
	Residual	885.368	71	12.470		
	Total	1278.880	74			

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Dari hasil uji signifikansi T pada tabel 4.21 menunjukkan nilai t hitung untuk variabel pengawasan adalah sebesar 3,743 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung > t tabel (3,743 > 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,898 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,000 < 0,05), maka hipotesis ketiga diterima, artinya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Tabel 4.21
Hasil Uji Signifikansi Parsial T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.880	7.590		.906	.368
AKUNTABILITAS (X1)	.017	.130	.013	.128	.898
TRANSPARANSI (X2)	.434	.158	.293	2.748	.008
PENGAWASAN (X3)	.574	.153	.390	3.743	.000

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Setelah dilakukan uji hipotesis hasil analisis regresi linear berganda dengan menilai uji kelayakan suatu model (Goodness of fit) selanjutnya dilakukan interpretasi persamaan regresi linear berganda dengan rumus :

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3 + e$$

$$Y = 6{,}880 + 0{,}017\ X1 + 0{,}434\ X2 + 0{,}574\ X3 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta sebesar 6,880 artinya jika akuntabilitas publik (X_1), transparansi publik (X_2), dan pengawasan (X_3) adalah 0, maka pengelolaan APBD (Y) nilainya adalah 6,880.
b. Koefisien regresi variabel akuntabilitas publik (X_1) sebesar 0,017, artinya jika akuntabilitas publik mengalami kenaikan 1% maka kinerja pengelolaan APBD akan mengalami kenaikan sebesar 0,017%.
c. Koefisien regresi variabel transparansi publik (X_2) sebesar 0,434, artinya jika transparansi publik mengalami kenaikan 1% maka kinerja pengelolaan APBD akan mengalami kenaikan sebesar 0,434%.
d. Koefisien regresi variabel pengawasan (X_3) sebesar 0,574, artinya jika transparansi publik mengalami kenaikan 1% maka kinerja pengelolaan APBD akan mengalami kenaikan sebesar 0,574%.

4.4.5. Uji Hipotesis Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat Apakah Akan Memperkuat/Memperlemah Hubungan Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat Apakah Akan Memperkuat/Memperlemah Hubungan Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Dengan cara mentransformasikan seluruh variabel ke dalam bentuk Ln atau Log10 dengan meregresikan nilai residualnya. Model pengujian ini membutuhkan dua tahap persamaan sebagai berikut

III. $Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3 + \beta 4\ X4 + \beta 5\ MRA\ (X1.X4) + \beta 6\ MRA\ (X2.X4) + \beta 7\ MRA\ (X3.X4) + e$

IV. $Ln_Y = \alpha + \beta 1\ Ln_X1 + \beta 2\ Ln_X2 + \beta 3\ Ln_X3 + \beta 4\ Ln_{X4} + \beta 5\ Ln\ MRA\ (X1.X4) + \beta 6\ Ln\ MRA\ (X2.X4) + \beta 7 Ln\ MRA\ (X3.X4) + e$

Tabel 4.22
Hasil Koefisien determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695[a]	.483	.453	.06679

a. Predictors: (Constant), Ln MRA(X3.X4), Ln_AKUNTABILITAS, Ln TRANSPARANSI, Ln PENGAWASAN

b. Dependent Variable: Ln PENGELOLAAN APBD

Hasil analisis model summary besarnya *adjusted R square* adalah sebesar 0,453 cukup tinggi atau 4,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabilitas pengelolaan APBD dapat dijelaskan oleh variabel Ln Pengelolaan APBD, Ln_akuntabilitas publik, Ln_transparansi publik, Ln_pengawasan dan Ln MRA (X3_X4) sebesar 4,53% dengan rincian (100% - 4,53% = 95,47%) sedangkan sisanya 95,47% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 4.23
Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.291	4	.073	16.325	.000[a]
	Residual	.312	70	.004		

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Total	.604	74			

a. Predictors: (Constant), Ln MRA(X3.X4), Ln_AKUNTABILITAS, Ln_TRANSPARANSI, Ln_PENGAWASAN

b. Dependent Variable: Ln PENGELOLAAN APBD

Dari hasil uji signifikansi F dari tabel 4.24 di dapatkan nilai F hitung sebesar 16.325 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti model regresi Ln_akuntabilitas publik, Ln_transparansi publik, Ln_pengawasan dan Ln MRA (X3_X4) dapat digunakan secara keseluruhan (simultan) mempengaruhi pengelolaan APBD.

Tabel 2.24
Hasil Uji signifikansi T

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.531	.538		.986	.327		
Ln_AKUNTABILITAS	-.048	.100	-.044	-.479	.633	.895	1.118
Ln_TRANSPARANSI	.187	.112	.159	1.662	.101	.810	1.235
Ln_PENGAWASAN	-.111	.176	-.084	-.627	.533	.414	2.413
Ln MRA(X3.X4)	.434	.088	.690	4.941	.000	.379	2.642

a. Dependent Variable: Ln PENGELOLAAN APBD

Excluded Variables[b]

Model	Beta In	T	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
					Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1 Ln SAP	.[a]	.	.	.	.000	.	.000
Ln MRA(X1.X4)	.[a]	.	.	.	.000	.	.000
Ln MRA(X2.X4)	.[a]	.	.	.	.000	.	.000

a. Predictors in the Model: (Constant), Ln MRA(X3.X4), Ln_AKUNTABILITAS, Ln_TRANSPARANSI, Ln_PENGAWASAN

b. Dependent Variable: Ln PENGELOLAAN APBD

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dari hasil uji signifikansi T pada tabel 4.24 menunjukkan nilai t hitung untuk variabel Ln_akuntabilitas publik adalah sebesar 0,479 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung > t tabel (3,743 > 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,633 lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,633 > 0,05), artinya akuntabilitas publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan APBD. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas publik tidak bermoderasi dengan pengelolaan APBD.

Dari hasil uji signifikansi T menunjukkan nilai t hitung untuk variabel Ln_transparansi publik adalah sebesar 1,662 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung > t tabel (1,662 > 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,101 lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,101 > 0,05), artinya transparansi publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan APBD. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi publik tidak bermoderasi dengan pengelolaan APBD.

Dari hasil uji signifikansi T menunjukkan nilai t hitung untuk variabel Ln_pengawasan adalah sebesar 0,627 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung > t tabel (0,627 > 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,533 lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,533 > 0,05), artinya pengawasan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan APBD. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan tidak bermoderasi dengan pengelolaan APBD.

Dari hasil uji signifikansi T menunjukkan nilai t hitung untuk variabel Ln MRA(X3.X4) sebesar 4,941 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung > t tabel (4,941 > 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,000 > 0,05), artinya pengawasan dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBD. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi pengawasan mampu memoderasi hubungan antara standar

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

akuntansi pemerintah dengan pengelolaan APBD terlihat dari signifikansi Ln MRA(X3.X4) sebesar 0,000.

Dari hasil Coefficients yang ditampilkan tidak terjadi multikoloneritas karna secara otomatis SPSS telah mengeluarkan variabel yang menjadi penyebab terjadinya multikoloneritas yaitu Ln_SAP, Ln MRA(X1.X4), Ln MRA(X2.X4) dengan melihat Ln_Pengelolaan APBD *Excluded variable* bahwa standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas dan transparansi dikeluarkan dari output coefficients. Hasil dari variabel moderasinya dilihat dari nilai signifikan Ln MRA (X3.X4). Jadi, variabel moderasi pengawasan mampu memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan pengelolaan APBD. Temuan ini juga menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah adalah bukan sebagai variabel moderat.

Berdasarkan dari hasil uji analisis regresi moderat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Ln_Y $= \alpha + \beta 1$ Ln_X1 $+ \beta 2\ Ln_X2 + \beta 3\ Ln_X3 + \beta 4\ Ln_{X4} + \beta 5\ Ln\ MRA\ (X1.X4) +$

$\beta 6\ Ln\ MRA\ (X2.X4) + \beta 7 Ln\ MRA\ (X3.X4) + e$

Ln_Y = 0,531 – 0,048 Ln_X1 + 0,187 Ln_X2 – 0,111 Ln_X3 + 0 Ln_X4 + 0 $Ln\ MRA\ (X1.X4)$ + 0 $Ln\ MRA\ (X2.X4)$ + 0,434 $Ln\ MRA\ (X3.X4)$ + e

Keterangan dari persamaan regresi adalah sebagai berikut :

a. Konstanta yang dihasilkan sebesar 0,531 relatif mengalami penurunan dibandingkan dari persamaan regresi linear berganda sebesar 6,880 sebelum dimoderasi oleh variabel standar akuntansi pemerintah.

b. Koefisien regresi variabel Ln_akuntabilitas publik (Ln_X_1) sebesar -0,048 dengan nilai probabilitas signifikan 0,633 yang berarti variabel Ln_akuntabilitas publik tidak bermoderasi dengan pengeloaan APBD.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c. Koefisien regresi variabel Ln_transparansi publik (Ln_X_2) sebesar 0,187 dengan nilai probabilitas signifikan 0,101 yang berarti variabel Ln_transparansi publik tidak bermoderasi dengan pengeloaan APBD.

d. Koefisien regresi variabel Ln_pengawasan (Ln_X_3) sebesar -0,111 dengan nilai probabilitas signifikan 0,533 yang berarti variabel Ln_pengawasan tidak bermoderasi dengan pengeloaan APBD.

e. Koefisien regresi variabel Ln_standar akuntansi pemerintah (Ln_X_4) sebesar 0,0 dengan nilai probabilitas signifikan 0,000 yang berarti variabel Ln_standar akuntansi pemerintah adalah bukan sebagai variabel moderator yang bermoderasi dengan pengeloaan APBD.

f. Koefisien regresi variabel Ln MRA (X1-X4) sebesar 0,0 dengan nilai probabilitas signifikan 0,000 yang berarti variabel Ln MRA (X1-X4) akuntabilitas publik tidak memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan pengeloaan APBD.

g. Koefisien regresi variabel Ln MRA (X2-X4) sebesar 0,0 dengan nilai probabilitas signifikan 0,000 yang berarti variabel Ln MRA (X2-X4) transparansi publik tidak memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan pengeloaan APBD.

h. Koefisien regresi variabel Ln MRA (X3-X4) sebesar 0,434 dengan nilai probabilitas signifikan 0,000 yang berarti variabel Ln MRA (X1-X4) pengawasan memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan pengeloaan APBD.

4.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis model summary besarnya menunjukkan hubungan yang sedang bahwa kemampuan variabel-variabel independen (akuntabilitas publik, transparansi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

publik, dan pengawasan) terhadap variabel dependen (pengelolaan APBD). Artinya semakin dekat nilai R ke +1 atau ke -1 semakin kuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila R mendekati -1 hubungannya adalah negatif, berarti bahwa variabel dependen (Y) menurun bersamaan dengan meningkatnya variabel inependen (X). Sebaliknya, ketika R mendekati +1 hubungannya adalah positif, berarti bahwa variabel dependen (Y) naik bersamaan dengan naiknya variabel independen (X). Nilai koefisien determinasi (*coefficient of determination*) nilai *Adjusted R square* adalah 0,278 atau 2,78%. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara variabel dependen (pengelolaan APBD) dengan variabel-variabel independen (akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan).

Analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pejabat yang terkait dengan pengelolaan APBD pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan maka pengelolaan APBD dilakukan sesuai dengan prinsip *value for money*. Artinya pengelolaan APBD oleh pejabat dilakukan belum secara hemat, masih ada pemborosan, belum adil dan merata, serta belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Besarnya pengaruh tersebut sebesar 2,78% dengan rincian (100% - 2,78% = 97,22%) sedangkan sisanya 97,22% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

a. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik Secara Simultan Maupun Parsial Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD.

Hasil uji signifikansi keseluruhan (simultan) F test di dapatkan nilai F hitung sebesar 10.519 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan APBD dengan kata lain akuntabilitas publik secara keseluruhan (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Artinya pengelolaan APBD dilakukan secara akuntabilitas publik oleh pejabat pada Dinas dalam satuan SKPD dengan pertanggungjawaban segala aktivitas yang ditimbulkan.

Dari hasil uji signifikansi parsial (uji T test) menunjukkan nilai t hitung untuk variabel akuntabilitas publik adalah sebesar 0,128 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung < t tabel (0,128 < 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,898 lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,898 > 0,05), maka hipotesis pertama ditolak, artinya akuntabilitas publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan APBD. Artinya akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD atau dengan kata lain pengelolaan APBD belum dilakukan secara akuntabilitas publik dengan prinsip *value for money* yaitu hemat, adil dan merata sesuai kebutuahn masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen akuntabilitas publik dalam pemerintahan belum dilaksanakan yaitu prinsip-prinsip pemerintah, hukum, keterbukaan, keberpihakan dan kesamaan dihadapan hukum belum dihargai.

b. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Transparansi Publik Secara Simultan Maupun Parsial Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD.

Hasil uji signifikansi keseluruhan (simultan) F test di dapatkan nilai F hitung sebesar 10.519 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan APBD dengan kata lain transparansi publik secara keseluruhan (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan APBD. Artinya pengelolaan APBD dilakukan secara transparansi publik oleh pejabat pada Dinas dalam satuan SKPD dengan keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dari hasil uji signifikansi parsial (uji T test) menunjukkan nilai t hitung untuk variabel transparansi publik adalah sebesar 2,748 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung > t tabel (2,748 > 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,008 lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,008 > 0,05), maka hipotesis kedua ditolak, artinya transparansi publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan APBD. Artinya tidak ada pengaruh baik dan buruknya pengelolaan APBD dengan transparansi publik. Berarti seluruh Dinas dalam perangkat SKPD di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan APBD, pemerintah belum proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan. Sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sember daya yang diprcayakan sesuai Undang-Undang. Hal ini mendekati penelitian yang dilakukan Sopanah, Wahyudi Isa (2007 yang menyatakan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD dan Siregar Liper (2011) yang menyatakan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Dapat disimpulkan tidak tertransparansinya pengelolaan APBD menyebabkan tidak tercapainya pelayanan publik yang baik sehingga transparansi publik dilakukan dengan boros, tidak adil, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak merata.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Pengawasan Secara Simultan Maupun Parsial Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD.

Hasil uji signifikansi keseluruhan (simultan) F test di dapatkan nilai F hitung sebesar 10.519 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan APBD dengan kata lain

pengawasan secara keseluruhan (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan APBD. Artinya pengelolaan APBD dilakukan pengawasan oleh pejabat pada Dinas dalam satuan SKPD dengan mengawasi jalannya proses pengelolaan APBD dengan pengendalian yang telah ditetapkan.

Dari hasil uji signifikansi parsial (uji T test) menunjukkan nilai t hitung untuk variabel pengawasan adalah sebesar 3,743 sedangkan t tabelnya adalah df = 0,227 berarti t hitung > t tabel (3,743 > 0,227). Selain itu nilai signifikansinya adalah 0,898 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 berarti (0,000 < 0,05), maka hipotesis ketiga diterima, artinya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBD. Artinya adanya pengaruh dan keterkaitan baik buruknya pengelolaan APBD dengan pengawasan, dari hasil pengujian bahwa Dinas dalam Perangkat SKPD di Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta telah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan APBD dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian dilibatkannya dan peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan APBD dapat menyebabkan tercapainya pelayanan publik yang baik sehingga pengeloaan APBD dilakukan dengan tidak boros, adil dan merata serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

d. Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat Apakah Akan Memperkuat/Memperlemah Hubungan Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen

Pada pengujian Analisis Regresi Moderate dihasilkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah bermoderasi antara pengawasan dengan pengelolaan APBD. Artinya pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan dengan standar akuntansi pemerintah akan memberikan kontribusi pengukuran kinerja dan pengamblan keputusan terbaik dalam

menjamin pengendalian publik untuk mendukung pencapaian akuntabilitas publik dan transparansi publik..

Variabel standar akuntansi pemerintah tidak bermoderasi antara akuntabilitas publik dengan pengelolaan APBD. Artinya tidak ada pengaruh atau hubungan standar akuntansi pemerintah antara akuntabilitas publik dengan pengelolaan keuangan. Tidak adanya hubungan standar akuntansi pemerintah dengan akuntabilitas publik merupakan fakta dilingkungan Dinas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beranggapan bahwa pengelolaan APBD merupakan pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas dalam praktik-praktiknya. Akuntabilitas publik belum bisa diterima sebagai suatu sarana menuju tata pemerintahan yang baik. Tidak adanya akuntabilitas pengelolaan APBD dapat menyebabkan tidak tercapainya pelayanan publik yang bak, artinya pengelolaan APBD dilakukan dengan boros, tidak adil dan merata serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Variabel standar akuntansi pemerintah tidak bermoderasi antara transparansi publik dengan pengelolaan APBD. Artinya tidak ada pengaruh atau hubungan standar akuntansi pemerintah antara transparansi publik dengan pengelolaan keuangan. Tidak adanya hubungan standar akuntansi pemerintah dengan transparansi publik merupakan fakta dilingkungan Dinas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beranggapan bahwa pengelolaan APBD merupakan dokumen yang harus dirahasiakan. Transparansi publik belum bisa diterima sebagai suatu sarana menuju tata pemerintahan yang baik. Tidak adanya transparansi pengelolaan APBD dapat menyebabkan tidak tercapainya pelayanan publik yang bak, artinya pengelolaan APBD dilakukan dengan boros, tidak adil dan merata serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil uji signifikansi parameter individu diperoleh hasil signfikansi jauh diatas ketentuan, yang artinya bahwa variabel standar akuntansi pemerintah tidak dapat mempengaruhi variabel akuntabilitas, transpransi dan pengawasan dengan pengelolaan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

APBD. Artinya standar akuntansi pemerintah tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel akuntabilitas, transpransi dan pengawasan dengan pengelolaan APBD.

Pengelolaan Keuangan dipertanggungjawabkan sesuai dengan baik dan buruk tidak karena adanya standar akuntansi pemerintah. Ada atau tidaknya akuntabilitas, transpransi dan pengawasan dalam pengelolaan APBD tidak memiliki hubungan dengan standar akuntansi pemerintah. Maka disimpulkan standar akuntansi pemerintah bukanlah disebut sebagai variabel moderating antara variabel akuntabilitas, transpransi dan pengawasan dengan variabel pengelolaan APBD.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan terhadap hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan pengelolaan APBD. Berdasarkan hasil analisis data hasil SPSS dapat disimpulkan yaitu :

1. Dari hasil uji signifikansi keseluruhan (simultan) uji F test disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.
2. Dari hasil uji signifikansi parsial uji t test, variabel akuntabilitas publik berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD secara parsial. Variabel transparansi publik berpengaruh positif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap pengelolan APBD secara parsial. Artinya tidak ada hubungan akuntabilitas publik dan transpransi publik dengan pengelolaan APBD. Variabel pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBD secara parsial. Artinya APBD telah digunakan dengan hemat, adil dan merata serta sesuai kebutuhan publik.
3. Dari hasil analisis regresi moderat (*Moderate Analysis Regression*) menunjukkan dari hasil uji signifikansi parameter individual dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan tidak signifikan bermoderasi dengan pengelolaan APBD. Akan tetapi variabel pengawasan mampu memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan pengelolaan APBD. meskipun Standar akuntansi pemerintah dari hasil uji yang dihasilkan bukanlah disebut sebagai variabel moderating.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5.2. Saran

Hasil dari penelitian ini masih ada keterbatasan karena penelitian ini menyebar kuesioner tanpa melakukan wawancara kepada responden pejabat SKPD yang berwenang dalam pengelolaan APBD dan penelitian ini belum mencakup semua perangkat dalam SKPD, dalam penelitian ini masih menggunakan sampel yaitu pada Dinas-dinas saja. Dengan demikian saran dari peneliti diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat memberikan pengaruh yang lebih baik lagi dalam penelitian di lingkup Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Muslim. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.

Basri. (2008). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah*. Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru

Basri Yesi Mutia. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 8 Nomor1, 2008 : 29 - 39

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*.Jakarta :Penerbit Erlangga

Fatchurrochman, Agam. 2002. *Manajemen Keuangan Publik* , Materi Pelatihan Anti Korupsi.Indonesian Coruption Wact 23-25 Januari 2002 , Jakarta.

Ghozali, imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ketiga. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Hartadi, 1987. *Auditing*. Edisi 1. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Halim, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta UPP YKPN

Ikhwanulkarim Iwan, 2009, *Dasar-Dasar Keuangan Sektor Publik*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Jakarta 2010.

Mahsun, M.,Sulistiyowati, F.,Andre Purwanugraha, H., (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE UGM, Edisi 3.

Mahsun, M.,(2006). *Pengukuran Kinerja Sektor publik*. Yogyakarta : BPFE UGM, Edisi 1.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi. Edisi 1.

Mardiasmo. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta YKPN

Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Andi. Jogjakarta

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik* . Andi. Jogjakarta

Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governace*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006

MD Ihyaul Ulum . 2009. *Audit Sektor Publik*. Bumi Aksara Jakarta

Mursyidi, 2009 *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama Bandung

Nordiawan, Putra, Rahmawati. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Selemba Empat : Jakarta

Panduan MUSREMBANG Kota Pematangsiantar Tahun 2010

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

Peraturan Pemerintah Nomor.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Renyowijoyo Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media Jakarta.

Sopanah, Wahyudi Isa 2007 Pengaruh Akuntansi Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) *Jurnal Akuntansi.*

Sopamah, Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi* (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.

Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Fokus Media Bandung.

Sulistoni G, 2003, Fiqh Korupsi : *Amanah VS Kekuasaan, Somasi, Nusa Tenggara Barat.*

Sumarsono Hadi, *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah*, JESP Vol.1, 2009

Sugiyono, 2010, *Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta* CV, Bandung

Syahrida, 2009, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penglolaan Keuangan Derah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara

Sopanah dan Wahyudi. (2004). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan AntaraPengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).* Malang. Jurnal Akuntansi.

Siregar, L.,*Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat.* (2011).Tesis S2. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan,Sumatera Utara.

Tanjung Abdul Hafiz, 2009, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD.* Selemba Empat Jakarta

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Wiyono, G (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS17.0 & SmartPLS 2.0*. Yogyaklarta : STIM YKPN YOGYAKARTA, Edisi 1.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat